

Nama : Nida Yasmin Sofiyah

NPM : 2313031026

Kelas : A

Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

Analisis dan Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya

1. Analisis Struktur Pengeluaran

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?

Struktur belanja saat ini belum efisien. Walaupun anggaran pendidikan mencapai 22% dari APBD, skor literasi dan numerasi siswa masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum berdampak optimal pada kualitas pendidikan.

Masalah utama terletak pada:

1. 68% anggaran digunakan untuk gaji dan tunjangan guru, namun distribusinya tidak merata; ada kelebihan guru di kota dan kekurangan guru di daerah terpencil.
2. Alokasi untuk infrastruktur, digitalisasi, dan bantuan siswa masih kecil, sehingga kesenjangan pendidikan antara kota dan desa tetap tinggi.

Bagaimana yang perlu direalokasi dan mengapa?

1. Gaji dan tunjangan guru tetap dipertahankan, tapi perlu redistribusi agar guru tersebar merata di seluruh wilayah.
2. Program bantuan siswa (8%) perlu ditingkatkan menjadi 13-15% agar siswa miskin mendapat dukungan langsung (beasiswa, transportasi, seragam).
3. Infrastruktur (12%) perlu ditingkatkan menjadi 17-20%, terutama untuk pembangunan dan digitalisasi sekolah di daerah terpencil.
4. Administrasi & lainnya (12%) sebagian dialihkan ke program langsung untuk siswa dan guru, melalui efisiensi sistem birokrasi dan digitalisasi pelaporan. Dengan realokasi ini, anggaran bisa digunakan lebih efektif dan tepat sasaran, meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?
Betul memang sebagian besar pembiayaan masih berasal dari APBD, sehingga provinsi sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini rentan terhadap ketimpangan, karena daerah kaya bisa memberikan lebih banyak dibanding daerah miskin.
- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif?
Perlu tetapi dengan syarat pemerintah tetap menjadi penanggung jawab utama pendidikan. Model yang tepat yaitu:
 1. Public-Private Partnership (PPP)
Model ini untuk pembangunan infrastruktur, laboratorium, atau fasilitas digital.
 2. Program CSR Perusahaan
Program ini untuk mendukung beasiswa siswa, pengadaan alat praktik, dan pelatihan guru.
 3. Kemitraan industri
Disini melibatkan perusahaan dalam pelatihan guru dan siswa, agar kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
 4. Social Impact Bond / Performance-Based Funding
Investor swasta membiayai program tertentu dan pemerintah membayar kembali jika target tercapai.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?
Negara anggota OECD memiliki pengalaman panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembiayaan yang berbasis kinerja dan kebutuhan siswa, yang relevan untuk Nusantara Raya jika diadaptasi secara bertahap.
Elemen praktik OECD yang realistis diadopsi yaitu:
 1. Performance-Based Budgeting (Anggaran Berbasis Kinerja)
Setiap sekolah atau daerah menerima dana tidak hanya berdasarkan jumlah guru atau gedung, tapi juga capaian belajar siswa. Contoh:

sekolah yang berhasil meningkatkan skor literasi dan numerasi, atau menurunkan angka putus sekolah, mendapat tambahan dana atau insentif. Manfaat: mendorong sekolah fokus pada hasil nyata, bukan sekadar input.

2. Student-Based Funding (Dana Berdasarkan Kebutuhan Siswa)

Dana dialokasikan per siswa, dengan tambahan untuk siswa miskin atau kurang mampu, siswa berkebutuhan khusus, siswa di daerah terpencil. Tujuan: mengurangi kesenjangan kualitas antara sekolah kota dan desa, memastikan siswa yang paling membutuhkan mendapat perhatian lebih.

3. Evaluasi Kinerja Guru Berbasis Data

3. Evaluasi guru tidak hanya melihat kehadiran atau ijazah, tetapi juga capaian belajar siswa, partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional, kolaborasi dengan guru lain dan inovasi pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan untuk penempatan guru, promosi, insentif, dan pengembangan kapasitas.

4. Monitoring dan Evaluasi Terpadu Berbasis Data

Data terpadu mencakup jumlah siswa, guru, kondisi sekolah, fasilitas, dan hasil belajar. Memudahkan pemerintah daerah atau pusat memutuskan prioritas intervensi dan alokasi anggaran secara objektif. Memastikan setiap dana yang dikeluarkan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan.

➤ Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Tantangan implementasi di Nusantara Raya / Indonesia

1. Kualitas dan validitas data

- a. Data Dapodik belum sepenuhnya akurat, terutama di daerah terpencil.
- b. Kesalahan data bisa membuat alokasi berbasis kinerja atau siswa menjadi tidak tepat sasaran.

2. Kesiapan birokrasi

- a. Banyak pejabat daerah terbiasa dengan anggaran berbasis input (jumlah guru, gedung baru) sehingga sulit beralih ke sistem berbasis kinerja.

- b. Diperlukan pelatihan SDM dan perubahan budaya kerja agar sistem baru efektif.
- 3. Resistensi tenaga pendidik
 - a. Guru mungkin menolak sistem evaluasi yang lebih ketat karena takut penempatan atau insentif tergantung pada hasil belajar siswa.
 - b. Solusinya yaitu sosialisasi, pelatihan, dan insentif positif agar guru merasa didukung, bukan dihukum.
- 4. Kesenjangan infrastruktur digital
 - a. Banyak sekolah di desa belum memiliki listrik, internet, atau perangkat digital.
 - b. Sulit menerapkan monitoring berbasis data dan pelatihan guru daring.
 - c. Solusinya yaitu pendekatan bertahap, prioritas untuk sekolah dengan kebutuhan tinggi dulu, kemudian diperluas ke seluruh wilayah.
- 5. Keterbatasan anggaran tambahan
 - a. Meskipun APBD sudah 22%, implementasi sistem OECD membutuhkan dana tambahan untuk digitalisasi, pelatihan, dan insentif guru.
 - b. Solusinya yaitu melibatkan sektor swasta, CSR, dan skema berbasis kinerja agar beban pemerintah tidak terlalu berat.

4. Rancangan Reformasi

Proposal

Reformasi Pembiayaan Provinsi Nusantara Raya (2026-2031)

I. Latar Belakang

Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya saat ini menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, antara lain ketimpangan kualitas sekolah di mana sekolah perkotaan cenderung lebih maju dibandingkan sekolah di desa dan daerah terpencil baik dari segi fasilitas, kualitas guru, maupun hasil belajar siswa; distribusi guru yang tidak merata, dengan

banyak guru menumpuk di kota sementara daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik sehingga mutu pembelajaran di beberapa wilayah masih rendah; keterbatasan infrastruktur digital, termasuk akses internet, komputer, dan media pembelajaran digital, terutama di sekolah pedesaan; serta hasil belajar siswa yang masih rendah, terbukti dari skor literasi dan numerasi yang berada di bawah rata-rata nasional. Meskipun anggaran pendidikan provinsi telah mencapai 22% dari APBD, struktur belanja saat ini belum sepenuhnya efektif karena dominasi pengeluaran untuk gaji guru sebesar 68% dan administrasi sebesar 12%, sedangkan program yang secara langsung meningkatkan mutu pendidikan masih relatif kecil. Oleh karena itu, reformasi pembiayaan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, pemerataan kualitas guru, digitalisasi sekolah, dan penerapan sistem monitoring berbasis data yang terstruktur.

II. Tujuan Proposal

1. Memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
2. Memperbaiki pemerataan kualitas guru dan mutu pembelajaran di seluruh provinsi.
3. Mengurangi kesenjangan akses pendidikan melalui digitalisasi sekolah.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.

III. Strategi Reformasi 5 Tahun

A. Perubahan Struktur Belanja

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya saat ini menunjukkan ketidakefisienan meskipun alokasi anggaran sudah mencapai 22% dari APBD. Sebagian besar anggaran, yakni 68%, digunakan untuk gaji dan tunjangan guru, sementara alokasi untuk infrastruktur digital, fasilitas pembelajaran, dan bantuan langsung

kepada siswa masih sangat minim. Kondisi ini menyebabkan kualitas pendidikan belum optimal, termasuk rendahnya skor literasi dan numerasi siswa di beberapa wilayah. Untuk itu, diperlukan perubahan struktur belanja agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara nyata. Strategi yang diterapkan meliputi pengurangan proporsi belanja administrasi yang berlebihan, peningkatan anggaran untuk program langsung yang mendukung siswa dan guru, serta penerapan *student-based funding*, di mana alokasi dana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, terutama yang berada di daerah miskin atau terpencil. Dengan reformasi ini, diharapkan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi dampak maksimal terhadap pemerataan kualitas pendidikan.

Pos Anggaran	Kondisi Saat Ini	Target Setelah Reformasi	Keterangan
Gaji & Tunjangan Guru	68 %	55-60%	Redistribusi guru, insentif daerah terpencil
Infrastruktur digital	12%	17-20%	Perbaikan gedung, labolatorium, internet, perangkat digital
Program Bantuan Siswa	8%	13-15%	Beasiswa, subsidi transportasi, bantuan seragam & makanan
Administrasi & lainnya	12%	8-10%	Efisiensi birokrasi, digitalisasi, laporan

B. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

1. Redistribusi Guru

Distribusi guru di Nusantara Raya saat ini tidak merata, dengan banyak guru menumpuk di perkotaan dan kekurangan di daerah terpencil. Oleh karena itu, surplus guru di kota perlu dipindahkan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. Agar guru bersedia ditempatkan di lokasi yang menantang, pemerintah harus memberikan insentif khusus berupa tunjangan tambahan, fasilitas perumahan atau transportasi, dan prioritas dalam promosi jabatan. Dengan langkah ini, pemerataan kualitas guru dapat tercapai, sehingga seluruh siswa memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

2. Pelatihan Guru Berkelanjutan

Peningkatan kualitas guru tidak hanya melalui jumlah guru, tetapi melalui kemampuan profesional mereka. Pelatihan berkelanjutan perlu difokuskan pada penguatan literasi, numerasi, pengajaran diferensiasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Metode pelatihan disesuaikan dengan kondisi wilayah; untuk guru perkotaan bisa menggunakan metode daring penuh, sementara guru di daerah terpencil menggunakan metode hybrid yang menggabungkan tatap muka dan modul daring. Hal ini memastikan semua guru memperoleh akses pelatihan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa.

3. Evaluasi Kinerja Guru

Evaluasi kinerja guru harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan kehadiran atau administrasi, tetapi juga hasil belajar siswa, keaktifan dalam pelatihan, dan penilaian dari kepala sekolah. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar redistribusi guru, promosi jabatan, dan pemberian penghargaan bagi guru berprestasi. Dengan sistem evaluasi berbasis kinerja, guru terdorong untuk terus meningkatkan kualitas mengajar dan memberikan dampak nyata bagi capaian belajar siswa.

4. Komunitas Belajar Guru

Selain pelatihan formal, guru juga perlu didorong untuk membentuk komunitas belajar yang memfasilitasi kolaborasi antar guru, berbagi praktik terbaik, pengalaman mengajar, dan strategi pembelajaran yang efektif. Komunitas ini menjadi ruang untuk pengembangan profesional secara berkelanjutan, sehingga guru tidak hanya mengandalkan pelatihan resmi tetapi juga belajar dari pengalaman sesama guru. Pendekatan ini meningkatkan kompetensi guru dan menciptakan budaya pembelajaran yang kolaboratif.

C. Digitalisasi Sekolah

1. Infrastruktur Digital

Digitalisasi sekolah menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Setiap SMP dan SMA, khususnya di daerah miskin, harus memiliki akses internet yang stabil, komputer atau laptop per kelas, proyektor, serta server lokal atau cloud. Infrastruktur ini mendukung pembelajaran modern, memungkinkan siswa belajar dengan media digital, serta membuka akses informasi yang lebih luas.

2. Platform Pembelajaran Digital

Sekolah perlu dilengkapi dengan Learning Management System (LMS) yang berisi modul pembelajaran, bank soal, forum diskusi guru, dan sistem ujian daring. Selain itu, aplikasi untuk siswa juga harus tersedia agar mereka dapat melakukan latihan literasi dan numerasi, mengikuti proyek pembelajaran interaktif, dan mengakses materi tambahan. Dengan platform ini, proses belajar mengajar menjadi lebih terstruktur, interaktif, dan dapat diakses dari mana saja.

3. Pelatihan Guru Digital

Agar infrastruktur dan platform digital dapat dimanfaatkan maksimal, guru harus mendapatkan pelatihan khusus dalam

penggunaan LMS, aplikasi ujian daring, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran harian. Pelatihan ini memastikan guru mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, mengembangkan metode pengajaran yang inovatif, dan meningkatkan keterampilan digital siswa.

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

1. Sistem Monitoring Berbasis Data

Monitoring yang baik membutuhkan sistem berbasis data yang mampu menampilkan informasi secara real-time. Dashboard ini memantau alokasi anggaran, distribusi guru, capaian belajar siswa, dan pemanfaatan fasilitas sekolah. Dengan sistem ini, pemangku kebijakan dapat melihat secara langsung efektivitas penggunaan anggaran dan intervensi yang telah dilakukan.

2. Evaluasi Berkala

Selain monitoring, evaluasi triwulanan dan tahunan perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana program-program pendidikan mencapai tujuan. Evaluasi ini mencakup hasil belajar siswa, kualitas pengajaran guru, serta efektivitas penggunaan anggaran. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi pendidikan secara berkelanjutan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Semua laporan anggaran dan capaian pendidikan harus dipublikasikan agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengawasi penggunaan anggaran. Transparansi ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah, mendorong penggunaan dana yang lebih efektif, dan membangun kepercayaan publik terhadap program pendidikan.

4. Tindak Lanjut Perbaikan

Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk revisi kebijakan, realokasi anggaran, dan penyesuaian strategi pembelajaran. Dengan siklus perbaikan yang terus menerus, reformasi pendidikan dapat berjalan efektif, menghasilkan

pemerataan kualitas, dan memastikan setiap kebijakan berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di seluruh Provinsi Nusantara Raya.

IV. Rencana Implementasi Tahunan

Tahun	Fokus Utama	Langkah Strategis
Tahun 1-2	Membangun Fondasi reformasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendataan lengkap sekolah, guru, dan fasilitas di seluruh kabupaten/kota. ➤ Identifikasi ketimpangan guru dan kondisi infrastruktur. ➤ Audit penggunaan anggaran guru dan administrasi. ➤ Memulai redistribusi guru bertahap, prioritas daerah terpencil. ➤ Memberikan insentif awal untuk guru yang bersedia pindah ke daerah kurang terlayani. ➤ Realokasi sebagian anggaran administrasi ke program bantuan siswa dan infrastruktur digital. ➤ Sosialisasi reformasi kepada semua pihak: guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat.
Tahun ke-3	Memperluas akses teknologi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemasangan jaringan internet di sekolah pedesaan. ➤ Penyediaan perangkat pembelajaran digital bagi siswa dan guru. ➤ Implementasi LMS daerah dan aplikasi belajar untuk siswa. ➤ Pelatihan guru dalam penggunaan teknologi digital.

Tahun ke-4	Peningkatan kualitas guru & pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan berkelanjutan guru, termasuk pengajaran diferensiasi dan evaluasi berbasis hasil belajar ➤ Kolaborasi antar guru melalui komunitas belajar. ➤ Pemberian penghargaan bagi guru berprestasi dan inovatif.
Tahun ke-5	Menjamin keberlangsungan reformasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem dashboard monitoring real-time digunakan untuk evaluasi anggaran dan hasil belajar. ➤ Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan kebijakan. ➤ Penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. ➤ Strategi keberlanjutan reformasi agar terus berkembang.

Rencana implementasi lima tahun ini disusun secara bertahap agar reformasi pembiayaan pendidikan berjalan sistematis, realistis, dan berkelanjutan. Setiap fase memiliki fokus yang saling melengkapi, dimulai dari penataan dasar hingga penguatan sistem pengawasan.

Pada tahun pertama dan kedua, pemerintah memprioritaskan penataan fondasi melalui pendataan menyeluruh, audit anggaran, serta redistribusi guru untuk mengatasi ketimpangan wilayah. Tahap ini menjadi dasar penting karena seluruh kebijakan berikutnya bergantung pada keakuratan data dan pemerataan sumber daya manusia.

Tahun ketiga menitikberatkan pada digitalisasi dan pemerataan infrastruktur teknologi sebagai sarana pendukung peningkatan mutu pembelajaran. Akses internet, perangkat digital, dan platform pembelajaran mulai diimplementasikan agar kesenjangan kualitas antara sekolah kota dan desa dapat dikurangi.

Memasuki tahun keempat, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas guru dan proses pembelajaran. Pelatihan berkelanjutan, evaluasi berbasis kinerja, serta kolaborasi melalui komunitas belajar menjadi strategi utama untuk mendorong peningkatan capaian belajar siswa secara nyata.

Pada tahun kelima, reformasi diperkuat melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis data secara menyeluruh. Tahap ini memastikan seluruh program yang telah berjalan dapat diukur efektivitasnya, disempurnakan, serta dijaga keberlanjutannya agar manfaat reformasi tetap dirasakan dalam jangka panjang. Dengan tahapan yang terstruktur ini, reformasi tidak hanya berhenti pada perubahan alokasi anggaran, tetapi benar-benar mengarah pada peningkatan mutu dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Provinsi Nusantara Raya.